

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 660 / 631 / DLH / 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2019**



**PALANGKA RAYA  
2018**



# **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Willem A.S No. 08 Palangka Raya Telepon / Faksimile (0536) 3223756  
Email : dlh.provkalteng@gmail.com

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 660 / 631 / DLH / 2018**

**TENTANG**

### **PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019**

#### **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, maka perlu dilakukan pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan "Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 39);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 17).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 28 September 2018

KEPALA DINAS,



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut.,MP.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196912121996031003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 660 / 631 / DLH / 2018  
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2019**

## **RENCANA KERJA TAHUN 2019**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan anugrah-Nya lah penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 ini dapat terselesaikan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta sinkronisasi dari Perencanaan Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilakukan sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan bidang kewenangan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2021 dengan menelaraskan kondisi eksisting serta isu-isu strategis yang ada pada saat ini.

Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi.

Sebagai akhir kata, dengan memohon petunjuk dan anugrah Allah SWT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah tersusun, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Palangka Raya, September 2018



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196912121996031003

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	2
1.3	Maksud dan Tujuan .....	4
1.4	Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU .....</b>	<b>6</b>
2.1	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra .....	6
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	9
2.3	Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	19
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>25</b>
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	25
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.....	26
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>28</b>
4.1	Program dan Kegiatan .....	28
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>31</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup, serta sebagai salah satu pendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Proses penyusunan Renja dilakukan melalui tahapan : (1) Persiapan penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Renja; (3) Pelaksanaan forum SKPD; dan (4) Penetapan Renja. Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud merupakan hasil pembahasan usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 untuk mendukung perwujudan visi dan misi daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi dasar estimasi terhadap penganggaran, yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019.

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan dengan memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global. Oleh karena itu dokumen perencanaan pembangunan daerah saling terkait satu sama lainnya mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah.

Renja Dinas Lingkungan Hidup sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain berpedoman kepada dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tentunya juga tetap mensinergikan dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal seperti Renstra dan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup secara khusus mendukung pencapaian misi daerah yang ke 7 (tujuh) sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran besar dalam mencapai misi tersebut, dimana seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Upaya-upaya pencapaian misi daerah tersebut tergambar dalam program dan kegiatan yang dirinci lebih lanjut dalam dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 88).
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 39) .

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun pada Dinas Lingkungan Hidup. Penyusunan Renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat secara konsekuen

dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Tujuan penyusunan Renja adalah :

- a. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup selama 1 (satu) tahun ke depan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017

#### 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 masih mengacu pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 sebanyak 13 program 48 kegiatan dan meliputi :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, 3 (tiga) kegiatan terdiri dari :
  - Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengelolaan Persampahan
  - Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
  - Pembinaan Pengelolaan Limbah B3
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, 9 (sembilan) kegiatan terdiri dari :
  - Koordinasi penilaian kota sehat Adipura
  - Pemantauan kualitas air
  - Pemantauan kualitas Udara
  - Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan
  - Penutupan Kualitas Tutupan Lahan
  - Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta analisa Beban Pencemar Air
  - Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota
  - Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
  - Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, 5 (lima) kegiatan terdiri dari :
  - Pengendalian Dampak Perubahan Lingkungan
  - Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
  - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem
  - Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
  - Pemetaan Wilayah Adat yang perlu di Konservasi
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, 3 (tiga) kegiatan terdiri dari :
  - Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
  - Inventarisasi ekosistem mangrove

- Rehabilitasi hutan dan lahan
- 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 8 (delapan) kegiatan terdiri dari :
  - Pengembangan data dan informasi lingkungan
  - Penyelenggaraan pameran LH di daerah
  - Rapat koordinasi lingkungan hidup
  - Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH
  - Pembinaan Generasi Muda Peduli Lingkungan
  - Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup KALPATARU
  - Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH
  - Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah
- 6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
  - Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
- 7. Program Penaatan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
  - Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

Selain program tersebut di atas, pelaksanaan kinerja juga ditunjang oleh program pendukung kesekretariatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 8 (delapan) kegiatan terdiri dari :
  - Penyediaan jasa Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 6 (enam) kegiatan terdiri dari :
  - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan Dinas /operasional
  - Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor
  - Rehabilitasi sedang berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
  - Pendidikan dan Pelatihan formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja SKPD

6. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, 1 (satu) kegiatan terdiri dari :
  - Pengelolaan Inventarisasi Barang Daerah

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 13.150.220.346,-. Realisasi penyerapan anggaran dari alokasi tersebut adalah sebesar 88,99 %.

Secara umum seluruh rencana program dan kegiatan tahun 2017 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan IV Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.1. (Lampiran 1)

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang daerah adalah “Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri dan Adil”. Salah satu misi pembangunan jangka panjang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu : Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Menurunnya Degradasi Lingkungan, dengan Indikator Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Target peningkatan IKLH yang ditetapkan di dalam RPJMD 2016-2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Program dan pencapaian Dinas Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021 guna mencegah terjadinya degradasi kualitas lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut :

No	Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,73	71,5	72	72,5	73	73,5
2	Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
3	Peningkatan Kualitas akses informasi SDA, keanekaragaman hayati dan LH	14	14	14	14	14	14
4	Pemantauan, pengendalian dan pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut (jumlah lokasi)	6	7	7	8	8	9

No	Program	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Penyelesaian perselisihan/ sengketa lingkungan hidup (%)	25	45	60	75	90	100
6	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (jumlah Kabupaten/Kota)	14	14	14	14	14	14
7	IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang menerapkan Good Mining Practice (GMP)	12	25	30	37	42	50

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021

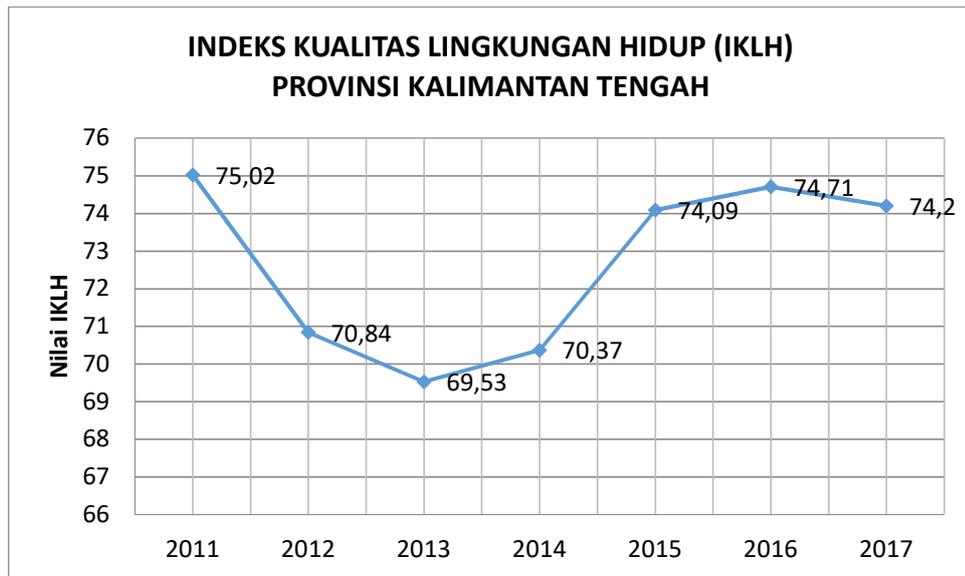
Sebagaimana diuraikan di atas, sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah Menurunnya Degradasi Lingkungan, dengan Indikator Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep *Environmental Performace Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter- parameter : SO<sub>2</sub> dan NO; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Pada tahun 2016 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah adalah 74,71 atau masuk dalam kategori Baik. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 82,22, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,80 sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 62,25.

Tahun 2017 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah adalah 74,2 atau masuk dalam kategori Baik. Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,26 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 92,25 sedangkan untuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 74,76.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

Indikator Kinerja Dinas lingkungan Hidup dikaitkan dengan program kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA , Keanekaragaman Hayati dan LH
  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
  - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
  - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
  - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH
5. Pemantauan dan Pengendalian dan Pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut
  - Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
6. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
  - Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - Program Pengendalian kebakaran hutan
7. Penyelesaian perselisihan sengketa lingkungan
  - Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH

Kinerja program dan kegiatan sejak tahun 2016-2017 yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup masing-masing diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - a. Peningkatan kemampuan aparatur pengelolaan persampahan  
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengelolaan persampahan khususnya di TPA dan TPST merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai tahap awal maka pada tahun 2017 dilaksanakan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pengelolaan Persampahan Secara Terpadu. Peserta sosialisasi adalah aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah sebanyak 40 orang.
  - b. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan  
Pada tahun 2017 dilakukan Sosialisasi Aspek Peraturan Pengelolaan Sampah dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup dan Instansi Terkait Guna Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan ini dengan realisasi sebanyak 60 orang dengan peserta seluruh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
  - c. Pembinaan pengelolaan limbah B3  
Pada tahun 2016 dilakukan pembinaan terhadap unit usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan limbah B3 dengan realisasi sebanyak 12 unit usaha yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan pada tahun 2017 sebanyak 9 unit usaha.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - a. Penilaian Kota Sehat / Adipura  
Adipura merupakan sebuah penghargaan dari Pemerintah Indonesia (Kementerian Negara Lingkungan Hidup), yang diberikan kepada kabupaten atau kota yang dinilai berhasil dalam mengelola kebersihan dan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan.  
Pada tahun 2016 dan 2017, seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 14 Kabupaten/Kota telah dilakukan pembinaan guna terwujudnya kota yang bersih, asri, hijau dan indah. Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil mendapatkan Piala Adipura pada tahun 2016 hanya 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat – Pangkalan Bun. Pada Tahun 2017 meningkat menjadi 2 yaitu Kotawaringin Barat – Pangkalan Bun dan Kabupaten Kapuas – Kuala Kapuas.
  - b. Pemantauan kualitas air  
Pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2016 dan 2017 menggunakan dana APBD diprioritaskan pada 2 sungai yaitu Sungai Lamandau dan Sungai Kahayan. Sedangkan bersumber dari dana APBN yaitu Sungai Jelai dan Sungai Barito. Hasil pemantauan pada tahun 2016 hingga 2017 menunjukkan

bahwa sebagian besar di lokasi pengambilan sampel menunjukkan kategori Cemar Ringan hingga Cemar Sedang.

- c. Pemantauan kualitas udara  
Pemantauan kualitas udara bersumber dari dana APBD dan APBN. Menggunakan dana APBD pemantauan kualitas udara dilakukan dengan metode manual aktif dengan parameter CO, HC, O<sub>3</sub> dan Pm<sub>10</sub>. Lokasi pengukuran dilakukan di 1 kota yaitu Kota Palangka Raya. Sedangkan bersumber dana APBN, pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan *metode pasive sampler* dengan parameter utama NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Lokasi pemantauan di 14 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dengan target lokasi pada daerah *road side*, pemukiman, kawasan industri, perkantoran dan remote area. Hasil pemantauan sejak tahun 2016 hingga 2017 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) yang dihitung dari nilai ISPU dikategorikan BAIK.
- d. Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Izin Lingkungan  
Tujuan dari kegiatan pengawasan dan pembinaan adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan di dalam memenuhi persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan. Jumlah perusahaan yang diawasi pada tahun 2016 sebanyak 16 perusahaan sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 36 perusahaan.
- e. Pemantauan kualitas tutupan lahan  
Pemantauan kualitas tutupan lahan bertujuan untuk menyediakan secara berkelanjutan data pemantauan kualitas tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengelolaan tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2017, bentuk kegiatannya berupa pengumpulan data primer melalui survey langsung ke lapangan (ground check).
- f. Identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air serta analisa beban pencemar air  
Tujuan identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar air serta analisa beban pencemar air adalah Tersedianya data sumber sumber pencemar air di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Tersedianya data untuk penetapan daya tampung beban pencemaran air sungai. Pada tahun 2017 dilakukan pemantauan di 2 sungai yaitu sungai Kahayan dan Sungai Lamandau.
- g. Pembinaan dan pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota  
Tujuan dari kegiatan pembinaan dan pengawasan KPA adalah agar jumlah KPA Kabupaten/Kota yang berlisensi meningkat dan menambah pengetahuan tim Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016 dan 2017, terdapat 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang Komisi Penilai Amdalnya telah berlisensi, sedangkan terdapat 5 (lima) Kabupaten yang belum memiliki Komisi Penilai Amdal berlisensi.

h. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan dan pengelolaan lingkungan (PROPER)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk : (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

Pada Tahun 2016 dari 43 peserta Proper dari Provinsi Kalimantan Tengah 3 Perusahaan mendapat predikat Hijau sedangkan 36 perusahaan lainnya meraih predikat Biru atau taat terhadap pengelolaan lingkungan Hidup, sedangkan 4 perusahaan meraih kategori merah atau belum taat sepenuhnya terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahun 2017 dari 43 peserta peringkat Hijau bertambah menjadi 4, peringkat Biru atau taat meningkat menjadi 37 perusahaan sedangkan yang masih mendapatkan peringkat merah sebanyak 2 perusahaan.

i. Penilaian Sekolah Adiwiyata

Sekolah adiwiyata adalah Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. ADIWIYATA berasal dari 2 kata sansekerta yaitu ADI dan WIYATA. Adi sendiri mempunyai arti yaitu besar, agung, baik, ideal atau sempurna. Sedangkan Wiyata mempunyai arti tempat dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika. ADIWIYATA artinya tempat yang besar, agung, baik dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika.

Pada tahun 2016 terdapat 3 sekolah adiwiyata mandiri sedangkan pada Tahun 2017 berjumlah 1 sekolah. Untuk adiwiyata nasional pada Tahun 2016 sebanyak 12 Sekolah sedangkan pada Tahun 2017 bertambah 3 sekolah lagi. Untuk adiwiyata provinsi pada tahun 2016 sebanyak 30 sekolah dan pada tahun 2017 sebanyak 32 sekolah, sehingga total sekolah adiwiyata provinsi berjumlah 62 sekolah.

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Pengendalian dampak perubahan iklim

Kegiatan pengendalian dampak perubahan iklim terutama terkait dengan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Tahun 2016 tersusun 1 dokumen dan Tahun 2017 juga tersusun 1 dokumen inventarisasi Gas Rumah Kaca di Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air  
Kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air baru dimulai pada Tahun 2017 sedangkan pada tahun 2016 belum ada kegiatan ini. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen daerah tangkapan air dan sumber-sumber air di Provinsi Kalimantan Tengah. Realisasi Pada Tahun 2017 penyusunan dokumen ini telah selesai dilakukan.
  - c. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem  
Kegiatan ini baru dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan terget adalah terkelolanya taman Kehati di Kabupaten/Kota dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah berupa Sosialisasi Pembangunan Taman Kehati Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
  - d. Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan  
Kegiatan pengendalian kerusakan hutan dan lahan difokuskan melakukan pengawasan ke lahan masyarakat. Pada Tahun 2017 teralisasi pengawasan terhadap 6 (enam) desa dan melakukan pemetaan perubahan daerah aliran sungai akibat pembukaan hutan dan lahan pada DAS Katingan bagian Hilir berupa 1 (satu) Dokumen.
  - e. Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi  
Output dari kegiatan ini adalah Jumlah wilayah adat yang mendapat pengakuan dari negara terhadap Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat dan Hutan Adat. Pada tahun 2016 terealisasi 1 wilayah adat Tumbang Bahanaei, Kabupaten Gunung Mas dan tahun 2017 terdapat 1 wilayah Tumbang Panggo, Kabupaten Katingan yang dilakukan identifikasi dan verifikasi wilayah adat, masyarakat adat dan hukum adat.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA  
Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat kegiatan ini. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah kelompok masyarakat di kabupaten Kapuas, Katingan dan Pulang Pisau yang mengembangkan varietas padi ladang lokal, jumlah kelompok di 3 Kabupaten adalah 6 (enam) kelompok masyarakat masing-masing Kabupaten terdapat 2 (dua) kelompok masyarakat.
  - b. Inventarisasi ekosistem mangrove  
Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat kegiatan ini. Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya data ekosistem mangrove. Pada tahun 2017 telah tersusun data ekosistem mangrove di Kabupaten Katingan dan Sukamara.
  - c. Rehabilitasi hutan dan lahan  
Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2016 tidak terdapat kegiatan ini. Output dari kegiatan ini adalah Jumlah komunitas lokal yang melakukan rehabilitasi lahan gambut berbasis kearifan

lokal. Pada tahun 2017 telah dibentuk komunitas lokal sebanyak 6 kelompok yang terdapat di Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau dan Katingan, dimana masing-masing Kabupaten terdapat 2 Kelompok

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - a. Pengembangan data dan informasi lingkungan  
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan pusat/sistem informasi bidang lingkungan baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Pada tahun 2016 dan 2017 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dan mengelola 1 website yaitu dlh.kalteng.go.id
  - b. Penyelenggaraan pameran LH di daerah  
Setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Daerah selalu melaksanakan kegiatan pameran yang melibatkan semua stakeholder dari berbagai kalangan. Melalui even ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ikut menyelenggarakan pameran yang diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pada tahun 2017, kegiatan pameran dilaksanakan di Sampit, ibukota kabupaten Kotawaringin Timur.
  - c. Rapat koordinasi lingkungan hidup  
Kegiatan rapat koordinasi lingkungan hidup setiap tahun dilaksanakan dengan dihadiri oleh seluruh Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka sinkronisasi terhadap pelaksanaan program kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tahun 2017 pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Sukamara.  
Selain pelaksanaan Rakorda, kegiatan ini juga untuk menghadiri Rapat Kerja Ekoregion Kalimantan yang pada tahun 2017 pelaksanaannya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
  - d. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH  
Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpantau dan terawasinya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
  - e. Pembinaan Generasi Muda Peduli Lingkungan  
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan generasi muda agar peduli terhadap lingkungan. Pada tahun 2017, jumlah generasi muda yang dibina sebanyak 28 orang.
  - f. Pemberian Anugrah Lingkungan Hidup KALPATARU  
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam upaya penyelamatan fungsi lingkungan. Pada tahun 2017, terdapat Nominator Anugrah Kalpataru

Kategori Perintis Lingkungan yang berasal dari Kalimantan Tengah yaitu Ibu Siti Maimunah.

g. Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH

Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi dasar pertimbangan utama dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan sektor. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pada tahun 2016 kegiatan ini belum dilaksanakan sedangkan pada tahun 2017 dilakukan inventarisasi daya dukung dan daya tampung.

h. Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah

Nirwasita Tantra adalah penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah atas kepemimpinannya dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan/atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Penghargaan ini dinilai berdasarkan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), sekarang dokumen SLHD ini berganti menjadi dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Penghargaan Nirwasita Tantra merupakan piala bergilir yang dikompetisikan setiap tahun bagi seluruh daerah.

Pada tahun 2016 dan 2017 telah disusun dokumen IKPLHD masing-masing 1 (satu) dokumen.

6. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

a. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Bencana kebakaran dan asap merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada masalah hutan dan lahan, namun juga merusak lingkungan dengan menurunnya biodiversitas serta meningkatkan emisi karbon, selain itu banyak aspek kehidupan masyarakat yang terganggu seperti masalah transportasi, ekonomi dan kesehatan, bahkan pada bencana kebakaran dan asap pada tahun 2015 telah mengganggu aktifitas pendidikan dan berlangsungnya kegiatan pemerintahan.

Dalam rangka Mitigasi dan persiapan (*preparedness*), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan ke Kabupaten/Kota diharapkan dapat menggali masukan perancangan peraturan daerah tentang kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2017 dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan koordinasi lintas sektor dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

## 7. Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan

- a. Koordinasi dan fasilitas sengketa lingkungan melalui pos pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

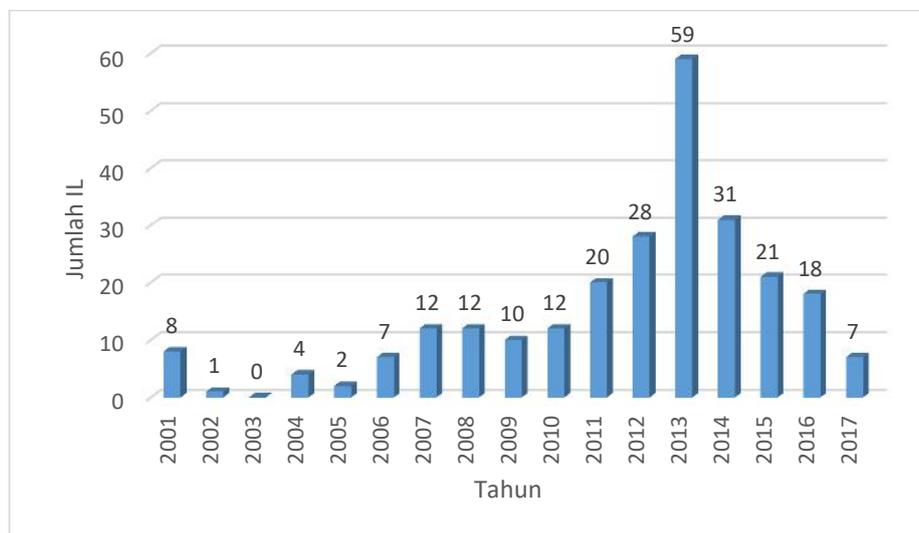
Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2012 telah membentuk Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah penyelesaian Jumlah kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat di proses sesuai ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016 terdapat 12 kasus yang dapat diselesaikan sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Izin Lingkungan untuk kegiatan strategis skala provinsi dan/atau kegiatan lintas Kabupaten/Kota dan/atau kegiatan wajib AMDAL namun Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten/Kota belum memiliki Lisensi
2. Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali oli bekas skala provinsi
3. Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

### Izin Lingkungan

Jumlah izin lingkungan yang telah diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Desember 2017 sebanyak 243 buah. Izin lingkungan ini diberikan untuk kegiatan-kegiatan di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, terminal khusus dan lain-lain yang wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data Izin Lingkungan yang telah diberikan sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018

### Izin Pengumpulan Limbah B3 kecuali Oli Bekas Skala Provinsi

Sampai dengan tahun 2017 DLH Provinsi Kalimantan Tengah baru memberikan Izin pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi untuk satu perusahaan yaitu PT. INDO RUDY JAYA. Minimnya perusahaan yang membuka usaha di bidang pengumpulan limbah B3 diduga

karena beratnya persyaratan dan kewajiban yang harus disediakan oleh perusahaan yang akan membuka usaha pengumpulan Limbah B3.

#### Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kasus-kasus lingkungan hidup sejak tahun 2008 DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah membuka Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa lingkungan. Tahun 2017 jumlah pengaduan yang masuk ke DLH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 8 Kasus. Jenis pengaduan lingkungan yang disampaikan oleh masyarakat antara lain, dugaan pencemaran lingkungan akibat pengolahan limbah cair dan atau limbah padat yang dilakukan oleh perusahaan. DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti 8 kasus tersebut dan telah dilakukan verifikasi lapangan secara langsung.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai peraturan tersebut target capaian berakhir pada tahun 2013. Pelaksanaan SPM selanjutnya tetap dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan tersebut sebagaimana dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.2/Menlhk-II/2015 Tanggal 27 Maret 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Pelayanan dimaksud mencakup:

- a) Pelayanan pencegahan pencemaran air
- b) Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
- c) Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
- d) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup tahun 2017 terintegrasi dalam 3 (tiga) program yaitu :

- a) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
- c) Program penaatan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017-2018 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2019-2020 sebagaimana dalam tabel 2.2 (lampiran 2).

### **2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai dengan Peraturan Gubernur dimaksud

maka tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
2. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
3. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
4. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
5. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup, pencapaian visi misi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, salah satu misi yakni misi ke-7 (tujuh) merupakan misi yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah **"Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam"**. Tujuan dari misi tersebut adalah **Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**. Sasaran dan indikator sasaran yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu **menurunnya degradasi lingkungan dengan indikator peringkat Indeks kualitas lingkungan hidup**. Sasaran tersebut menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Isu-isu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, secara umum meliputi:

- a. Belum terlaksananya upaya untuk mendukung ekonomi berkelanjutan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan, pengendalian pencemaran serta pengawasan lingkungan hidup.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016– 2021, isu-isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah meliputi :

**a. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**

Pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan bersumber dari kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan emas dan batubara maupun mineral logam lainnya, aktifitas terminal khusus CPO dan Batubara, penambangan rakyat tanpa izin kegiatan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI, Industri pengolahan CPO, Industri Kecil dan Menengah lainnya serta dari limbah domestik.

Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kalimantan Tengah secara langsung disebabkan dari buangan limbah industri maupun domestik serta dari erosi dan sedimentasi akibat kegiatan pembukaan lahan. Kerusakan lingkungan umumnya terjadi akibat kegiatan penambangan emas dan batubara serta mineral logam lainnya yang tidak mematuhi prinsip penambangan yang baik dan benar serta tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

**b. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya mengurangi laju kerusakan dan pencemaran terus dilakukan oleh pemerintah daerah serta berbagai komponen masyarakat. Berbagai bencana lingkungan hidup seperti banjir, kekeringan, longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya. Kondisi ini merupakan gambaran bahwa fungsi lingkungan hidup telah mengalami penurunan. Berbagai inisiatif yang dilakukan harus ditingkatkan dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan dan dilakukan dengan tepat sasaran. Oleh karenanya diperlukan tolak ukur pencapaian yang dapat mudah dipahami dan bersifat implementatif.

Hal ini mengingat bahwa lingkungan hidup bersifat kompleks dan berbasis ilmiah dan diperlukan pemahaman operasional. Dengan begitu dapat dilakukan perencanaan, implementasi dan evaluasi secara lebih optimal. Untuk mengetahui tingkat pencapaian upaya-upaya tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2009 telah mengembangkan alat ukur yang mudah dipahami, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Melalui indeks ini akan mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat. Seluruh data dan informasi yang dibutuhkan harus dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. IKLH adalah pengejawantahan parameter lingkungan hidup yang kompleks namun tetap mempertahankan makna atau esensi dari masing-masing indikatornya. IKLH akan terus disempurnakan kualitasnya agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi nyata di lapangan.

**c. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi setiap tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kejadian terparah kebakaran hutan dan lahan terjadi tahun 2015 . Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktifitas manusia dalam pembukaan lahan, baik yang dilakukan oleh korporasi maupun masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan sangat berdampak terhadap penurunan kualitas udara, kerusakan lahan gambut, serta mengganggu perekonomian masyarakat.

**d. Penegakan Hukum Lingkungan**

Kasus pengaduan dari masyarakat terkait dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan pertambangan di wilayah Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain pengaduan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan juga pengaduan masalah dugaan pembakaran lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit saat melakukan *land clearing*.

**e. Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah**

Pengelolaan Limbah B3 yang wajib dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang belum sesuai dengan PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Hasil pengawasan menunjukkan banyak Limbah B3 yang dihasilkan belum dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 baik untuk kegiatan Penyimpanan Sementara maupun Untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3.

Pengelolaan Sampah atau limbah padat domestik merupakan tugas baru yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

**f. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah merupakan dampak global yang saat ini dialami oleh Dunia. Salah satu perubahan iklim yang terjadi adalah meningkatnya suhu bumi yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim global dan berdampak terhadap lingkungan hidup. Sumber terbesar perubahan iklim berasal dari emisi karbon yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama emisi dari kebakaran lahan gambut.

**g. Kapasitas Lingkungan Hidup**

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah relatif rendah. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan langkah dan strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui pemberdayaan masyarakat adat, pelajar dan sekolah serta program pendidikan lingkungan hidup lainnya serta pemberian penghargaan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

## **h. Perlindungan Lingkungan Hidup**

Perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup adalah melindungi ekosistem yang masih baik dari kerusakan akibat kegiatan pembangunan.

Isu-isu penting tersebut di atas menjadi fokus penanganan dan menjadi dasar perencanaan dalam penentuan/penetapan program kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 menambah program "**Green City**" sesuai dengan visi misi gubernur Kalimantan Tengah. Oleh karena itu program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan menyesuaikan tema tersebut guna mendukung pencapaian visi misi daerah, khususnya untuk pencapaian misi ke 7 (tujuh) yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 (Lampiran 3). Pada tabel tersebut disampaikan perbandingan antara rencana program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah.

### **2.5. Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi serta nasional.

Musrenbang merupakan instrumen proses perencanaan pembangunan, sehingga secara teknis berbagai keputusan dalam pelaksanaan pembangunan dirumuskan secara bersama dan dilaksanakan sesuai dengan jenjang pemerintahan. Selain sebagai wahana untuk mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan *top-down* dengan *bottom-up*, musrenbang juga merupakan wahana untuk pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non *government stakeholders* untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan pembangunan.

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renja, telah dilakukan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi termasuk penyelenggaraan Forum PD dan/atau Gabungan PD. Usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Tahun 2018 secara lengkap dirinci pada tabel 2.4 (Lampiran 4).

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Mengacu pada RPJMN 2015-2020, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa :

1. Penurunan Emisi GRK 15,5% menjadi  $\pm 26$  % pada tahun 2019;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019; dan
3. Meningkatnya model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Sasaran tersebut telah tercermin dalam misi ke 7 (tujuh) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (SDA). Hal ini dimaknai sebagai misi yang diemban dalam rangka perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Sasaran strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLHK memperhatikan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMD 2015 – 2019. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH dan sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH.
2. Pemantauan dan Pengawasan LH
3. Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan Keanekaragaman Hayati LH
4. Pemantauan Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan
6. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim
7. Inventarisasi Kearifan Lokal
8. Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3

### 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA-PD

Sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

- a. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan sasaran :
  - Meningkatkan Pelaksanaanaaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - Menyusun Baku Mutu Limbah lebih ketat dari Standar Nasional
  - Menyusun Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
  - Meningkatkan mutu dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) sebagai Instrumen Liingkungan Hidup
  - Penilaian ketaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program PROPER
- b. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) dengan sasaran :
  - Meningkatkan upaya penurunan beban pencemaran dari limbah domestic
  - Meningkatkan tutupan lahan pada kawasan hutan melalui kerjasama dengan stakeholder
  - Melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan guna mencegah terjadinya penurunan kualitas udara ambien
  - Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai
  - Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien
  - Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan
  - Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan
  - Menyusun regulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  - Mengembangkan kearifan lokal masyarakat adat dalam pembukaan lahan
- c. Menurunnya Kebakaran Hutan dan Lahan dengan sasaran :
  - Mengembangkan sistem peringatan dini bahaya kebakaran hutan dan lahan
  - Menyusun regulasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  - Mengembangkan kearifan lokal masyarakat adat dalam pembukaan lahan
- d. Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan dengan sasaran :
  - Melaksanakan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan
  - Mengembangkan instrument pengaduan masyarakat secara cepat dengan pemanfaatan teknologi komunikasi
  - Meningkatkan jumlah dan kompetensi PPNS Lingkungan Hidup
- e. Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3 dan Sampah Meningkatkan pengawasan pengelolaan Limbah B3 dengan sasaran :
  - Menyusun rencana pengelolaan sampah terpadu
  - Membangun sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Terpadu
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

- f. Terlaksananya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dengan sasaran :
- Mengoptimalkan pelaksanaan program REDD+
  - Meningkatkan kerjasama Rehabilitasi lahan gambut dengan BRG
  - Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari kegiatan sektor perkebunan dan pertanian
- g. Meningkatkan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan sasaran :
- Meningkatkan kompetensi Aparatur dalam pengelolaan lingkungan melalui diklat teknis
  - Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup melalui program Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru
  - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan hidup
  - Mengembangkan sistem informasi lingkungan
- h. Terlaksananya Perlindungan Lingkungan Hidup dengan sasaran :
- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
  - Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
  - Mengembangkan Taman KEHATI
  - Menyusun kawasan bernilai Konservasi Tinggi HVC di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan**

Sebagai implementasi guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Tahun 2016 - 2021 serta visi dan misi pemerintah, dan sesuai rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah 15 Program dan 55 Kegiatan pada RENJA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dengan total pagu indikatif Rp. 8.497.000.000,-. Adapun Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai :

##### **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

##### **II. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

##### **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

##### **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal

##### **V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

1. Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Pengembangan reformasi birokrasi

- VI. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset / Barang Daerah**
  - 1. Pengelolaan Inventarisasi Barang daerah
- VII. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampah**
  - 1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
  - 2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
  - 3. Bimbingan teknis persampahan
  - 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
  - 5. Lomba-lomba kebersihan kantor
- VIII. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**
  - 1. Koordinasi Penilaian Kota sehat/ADIPURA
  - 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3
  - 3. Pengkajian dampak lingkungan
  - 4. Pemantauan Kualitas Air
  - 5. Pemantauan Kualitas Udara
  - 6. Pengawasan Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan
  - 7. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air
  - 8. Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota
  - 9. Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
  - 10. Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata
- IX. Program Perlindungan dan Konservasi SDA**
  - 1. Pelaksanaan program HoB (Heart of Borneo)
  - 2. Pemetaan wilayah adat yang perlu di konservasi
- X. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam**
  - 1. Inventarisasi ekosistem mangrove
- XI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH**
  - 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
  - 2. Pengembangan data dan informasi lingkungan
  - 3. Penyelenggaraan pameran LH di daerah
  - 4. Penyelenggaraan hari-hari besar lingkungan hidup
  - 5. Rapat koordinasi lingkungan hidup
  - 6. Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH
  - 7. Penentuan daya dukung dan daya tampung LH
  - 8. Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah
  - 9. Penyusunan RPPLH
- XII. Program Pengendalian Kebakaran Hutan**
  - 1. Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan
  - 2. Koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
- XIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**
  - 1. Penataan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

**XIV. Program Penataan Hukum / Peraturan Perundang-Undangan LH**

1. Penyelesaian kasus pengaduan dan sengketa lingkungan

**XV. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim**

1. Pengendalian dampak perubahan iklim

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan Prakiraan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 (Lampiran 5).

Rencana program dan kegiatan yang tercantum pada Tabel 4.1 tentunya masih berupa rencana yang dapat mengalami perubahan pada realisasi tergantung pada beberapa faktor, misalnya menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan daerah, terbitnya peraturan perundangan yang mengganti peraturan yang berlaku saat ini, perubahan struktur organisasi dan lain sebagainya.

Adapun mengenai pelaksanaan program dan kegiatan, tentunya harus memiliki indikator yang dapat diukur dan hendaknya dilaksanakan oleh satu bidang saja sehingga alur pertanggungjawaban keberhasilan program tersebut menjadi jelas. Oleh karena itu nantinya diperlukan pula penyesuaian nama program dan kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antar bidang pelaksana dari program dan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan kebijakan nasional, program dan kegiatan yang direncanakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup, baik melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Selain itu juga bertujuan untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2019 khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019, di dalam implementasinya perlu dilengkapi dengan dokumen turunan ataupun dokumen pelengkap (Petunjuk Operasional, Kerangka Acuan Kerja dan lain- lain) agar lebih mudah dalam implementasi dan pengoperasionalannya serta lebih memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian target dan kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutannya. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat segera terwujud.

Saran dan masukan terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2019 ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan dokumen ini.

Dibuat di : Palangka Raya  
Pada tanggal : September 2018

KEPALA DINAS,



**FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.**

Pembina Utama Muda

NIP. 196912121996031003

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN 1

## TABEL 2.1

### REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**TABEL 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN IV TAHUN 2017  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Perangka Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)									
2.05	LINGKUNGAN HIDUP									
<b>2.05 - 01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
2.05 - 01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	9.000 surat	4000 surat	2000 surat	2000 surat	100%	1000 surat	7000 surat	78%
2.05 - 01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Tersedianya bantuan dana kesehatan pegawai	0	0	0	0	0%	12 bulan	12 bulan	-
2.05 - 01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Jasa Milik Daerah	Tersedianya jaminan kantor beserta perlengkapannya	0	0	0	0	0%	12 bulan	12 bulan	-
2.05 - 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya pemeliharaan dan ijin operasional kendaraan dinas	36 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0%	12 bulan	12 bulan	33%
2.05 - 01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan dan jumlah pegawai kontrak yang menerima honorarium	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.05 - 01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat-alat yang diperlukan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 01.17	Penyediaan makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum	36 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0%	12 bulan	12 bulan	33%
2.05 - 01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat luar daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
<b>2.05 - 02</b>	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
2.05 - 02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya perlengkapan rumah dinas	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	1 paket	100%
2.05 - 02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	1 paket	100%
2.05 - 02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	50%
2.05 - 02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	36 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0%	12 bulan	12 bulan	33%
2.05 - 02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	3 gedung	50%
2.05 - 02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50%
2.05 - 02.41	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terlaksananya rehab rumah dinas	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	1 paket	100%
<b>2.05 - 03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.05 - 03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 stell	50%
<b>2.05 - 05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									
2.05 - 05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek	155 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100%	2 orang	62 orang	40%
<b>2.05 - 06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
2.05 - 06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	30 dokume n	7 dokume n	5 dokume n	5 dokumen	100%	7 dokumen	19 dokumen	63%
2.05 - 06.87	Pengembangan Reformasi dan Birokrasi	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi	3 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	1 laporan	33%
<b>2.05 - 08</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>									
2.05 - 08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah Dokumen Penaatan Aset/Barang Milik Daerah	6 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
<b>2.05 - 15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>									
2.05 - 15.2	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah aparaturn yang mampu melakukan pengelolaan persampahan	42 Kab/Kot a	0 Kab/Kot a	0 Kab/Kot a	0 Kab/Kota	0%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kot a	33%
2.05 - 15.11	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan persampahan	Jumlah orang yang mengetahui dan memahami kebijakan pengelolaan persampahan	42 Kab/Kot a	0 Kab/Kot a	0 Kab/Kot a	0 Kab/Kota	0%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kot a	33%
2.05 - 15.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya dokumen data dan informasi terkait pengelolaan sampah di Kab/Kota	1 dokume n	0 dokume n	0 dokume n	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.05 - 15.26	Lomba-Lomba Kebersihan Kantor	Terlaksananya lomba-lomba kebersihan kantor	114 SOPD	0 SOPD	0 SOPD	0 SOPD	0%	38 SOPD	38 SOPD	33%
<b>2.05 - 16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>									
2.05 - 16.01	Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura	Terwujudnya kota yang berwawasan, bersih, teduh, dan peduli terhadap lingkungan	84 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	14 Kab/Kota	42 Kab/Kota	50%
2.05 - 16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Tersedianya data/dokumen terkait pengelolaan Limbah B3 di provinsi Kalimantan Tengah	42 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	33%
2.05 - 16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Tersusunnya hasil validasi KLHS Provinsi, Kab/Kota	42 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	33%
2.05 - 16.17	Pemantauan kualitas air	Terpantaunya tingkat kualitas air	27 sungai dan danau	4 sungai dan danau	2 sungai dan danau	2 sungai dan danau	100%	2 sungai dan danau	8 sungai dan danau	30%
2.05 - 16.18	Pemantauan kualitas udara	Tersedianya data kualitas udara ambien	30 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	100%	5 lokasi	15 lokasi	50%
2.05 - 16.30	Pengawasan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan atau dokumen lingkungan	110 perusahaan	16 perusahaan	36 perusahaan	36 perusahaan	100%	30 perusahaan	82 perusahaan	75%
2.05 - 16.39	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	Terlaksananya kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air	10 DAS	0 DAS	2 DAS	2 DAS	100%	2 DAS	4 DAS	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.05 - 16.41	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	Jumlah KPA Berlisensi yang meningkat pengetahuannya dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL	42 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	100%	7 Kab/Kota	21 Kab/Kota	50%
2.05 - 16.42	Peningkatan Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah Usaha dan Kegiatan yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan LH	150 usaha/kegiatan	25 usaha/kegiatan	3 usaha/kegiatan	3 usaha/kegiatan	100%	24 usaha/kegiatan	52 usaha/kegiatan	35%
2.05 - 16.43	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	Jumlah Sekolah Yang berwawasan lingkungan	252 sekolah	42 sekolah	50 sekolah	50 sekolah	100%	42 sekolah	134 sekolah	53%
<b>2.05 - 17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>									
2.05 - 17.17	Pelaksanaan Program HoB	Tersusunnya Dokumen Konservasi daerah hutan adat	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	33%
2.05 - 17.22	Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	Teridentifikasi dan terverifikasi Wilayah Adat, Masyarakat Adat dan Hukum Adat	5 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%
<b>2.05 - 19</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>									
2.05 - 19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan	Tersedianya Informasi tentang lingkungan pada media masa	3 Kota	0 Kota	0 Kota	0 Kota	0%	1 Kota	1 Kota	33%
2.05 - 19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terlaksananya Pengembangan PIL/SIL bidang lingkungan di Provinsi dan Kab/Kota	6 web provinsi	1 web provinsi	1 web provinsi	1 web provinsi	100%	1 web provinsi	3 web provinsi	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.05 - 19.10	Penyelenggaraan Pameran LH di daerah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan LH	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	50%
2.05 - 19.19	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	Terlaksananya Rakor Lh dan Rapat Teknis	12 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	2 keg	6 keg	50%
2.05 - 19.22	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	Terlaksananya Pemantauan dan pelaksanaan DAK	6 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	50%
2.05 - 19.27	Penentuan daya Dukung dan Daya Tampung LH	Tersusunnya Dokumen DDL dan DTLH	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%
2.05 - 19.28	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya dokumen SLHD Provinsi	4 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%
<b>2.05 - 22</b>	<b>Program Pengendalian kebakaran hutan</b>									
2.05 - 22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan pencegahan Kebakaran hutan	8 Pertemuan	0	0	0	0%	4 pertemuan	4 pertemuan	50%
2.05 - 22.09	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah pertemuan koordinasi lintas sektor yang dilakukan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan	20 Kali	0 Kali	4 Kali	4 Kali	100%	2 Kali	6 Kali	30%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>2.05 - 24</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>									
2.05 - 24.05	Penataan RTH	Tersedianya RTH yang tertata sesuai dengan ketentuan yang berlaku	42 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	33%
2.05 - 24.11	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan	14 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0 Kab/Kota	0%	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%
<b>2.05 - 25</b>	<b>Program Pnaatan Hukum/ Peraturan Perundang-undangan LH</b>									
2.05 - 25.06	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	Prosentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	600 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300 %	50%
<b>2.05 - 29</b>	<b>Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>									
2.05 - 29.01	Pengendalian dampak perubahan iklim	Tersusunnya dokumen Inventarisasi GRK	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0%	1 dokumen	1 dokumen	33%

# LAMPIRAN 2

## TABEL 2.2

### Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

**TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>											
1	Jumlah surat dinas yang terkirim			2.000 surat	1.000 surat	1.000 surat	2.000 surat	2.000 surat	1.000 surat	1.500 surat	2.000 surat	
2	jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Terwujudnya pemeliharaan dan ijin operasional kendaraan dinas			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
4	Jumlah Pengelola keuangan dan jumlah pegawai kontrak yang menerima Honorarium			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
5	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan kantor			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
6	Jumlah jenis alat-alat yang diperlukan			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
7	Jumlah eksemplar koran			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
8	Tersedianya makan minum			-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
9	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat luar daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
10	terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah			12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
11	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-lain			-	-	1 tahun	1 tahun	-	-	1 tahun	1 tahun	
<b>II.</b>	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>											
1	Tersedianya sejumlah perlengkapan gedung kantor			1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	
2	Jumlah jenis peralatan gedung kantor			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
3	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas			-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
4	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			-	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	-	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
5	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
6	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	
7	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor			-	-	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	
<b>III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>												
1	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
<b>IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>												
1	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek			1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	
<b>V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>												
1	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SOPD			5 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5 dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
2	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi			-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
<b>VI. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>												
1	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>VII. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>												
1	Meningkatnya kinerja daerah yang mengelola sampah			-	-	1 Laporan	1 Laporan	-	-	1 Laporan	1 Laporan	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
2	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan Green City			-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan			-	-	60 orang	60 orang	-	-	60 orang	60 orang	
4	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			-	1 kota	1 kota	1 kota	-	1 kota	1 kota	1 kota	
5	Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman			-	38 SOPD	38 SOPD	38 SOPD	-	38 SOPD	38 SOPD	38 SOPD	
<b>VIII. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup</b>												
1	Terwujudnya kota yang berwawasan,bersih,teduh,dan peduli terhadap lingkungan			14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
2	Terlaksananya pemantauan pembinaan pengelolaan limbah B3 di Kalimantan Tengah			-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
3	Terselesaikannya pengkajian dokumen KLHS yang disusun oleh 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah			-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	-	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	
4	Tersedianya data pemantauan kualitas air			1 sungai	1 sungai	1 sungai	1 sungai	1 sungai	1 sungai	1 sungai	1 sungai	
5	Tersedianya data kualitas udara ambien			5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	
6	Jumlah perusahaan yang taat terhadap izin lingkungan			36 perusahaan	30 perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	36 perusahaan	30 perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	
7	Tersusunnya dokumen inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air			2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
8	Jumlah KPA berlisensi yang meningkat pengetahuannya dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL			7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	4 kab/kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	7 Kab/Kota	4 kab/kota	7 Kab/Kota	
9	Jumlah perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup			3 usaha/kegiatan	24 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	3 usaha/kegiatan	24 usaha/kegiatan	20 usaha/kegiatan	30 usaha/kegiatan	
10	Terlaksananya pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Kalimantan Tengah			50 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	50 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	42 sekolah	
<b>IX. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>												
1	Terlaksananya konservasi daerah kawasan hutan adat			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Teridentifikasi dan terverifikasi wilayah adat masyarakat adat dan hukum adat yang perlu dikonservasi			-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
<b>X. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>												
1	Tersedianya data ekosistem mangrove			1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	
<b>XI. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>												
1	Terlaksananya pemberitaan informasi pada media massa			-	1 kota	1 Kota	1 Kota	-	1 kota	1 Kota	1 Kota	
2	Terdatanya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di kabupaten/kota			14 kab/kota	14 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	4 kab/kota	4 kab/kota	
3	Terselenggaranya pameran LH			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
4	Terlaksananya peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia			-	-	1 Keg	1 Keg	-	-	1 Keg	1 Keg	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
5	Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Lingkungan Hidup dan Rapat Kerja Ekoregion Kalimantan Tahun 2019			2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	
6	Jumlah alat pemantauan kualitas air di Kabupaten/Kota			-	1 Peket	1 Paket	1 Peket	-	1 Peket	1 Peket	1 Peket	
7	Tersedianya status Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 berbasis Jasa Ekosistem dalam bentuk Atlas Peta Indikatif dan Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Provinsi			14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	
8	Tersusunnya dokumen SLHD Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
9	Tersusunnya dokumen RPPLH			-	-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	
<b>XII. Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>												
1	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan			-	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	-	4 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	
2	Terbitnya perda karhutla			14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	
<b>XIII. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>												
1	Ruang Terbuka Hijau yang tertata			-	1 Kab/kota	14 Kab/Kota	3 kab/kota	-	1 Kab/kota	3 kab/kota	3 kab/kota	
<b>XIV. Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan LH</b>												
1	Presentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>XV. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>												
1	Tersedianya Dokumen Inventarisasi GRK			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

# **LAMPIRAN 3**

## **TABEL 2.3**

### **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah**

**TABEL 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2019  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
<b>I.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.685.360.000,00</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.685.360.000,00</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah surat dinas yang terkirim	1.000 surat	10.000.000,00	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah surat dinas yang terkirim	1.000 surat	10.000.000,00	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	12 bulan	200.000.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	12 bulan	200.000.000,00	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	KOTA PALANGKA RAYA	Terwujudnya pemeliharaan dan ijin operasional kendaraan dinas	12 bulan	25.000.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	KOTA PALANGKA RAYA	Terwujudnya pemeliharaan dan ijin operasional kendaraan dinas	12 bulan	25.000.000,00	
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Pengelola keuangan dan jumlah pegawai kontrak yang menerima Honorarium	12 bulan	690.320.000,00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Pengelola keuangan dan jumlah pegawai kontrak yang menerima Honorarium	12 bulan	690.320.000,00	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	314.200.000,00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan kantor	12 bulan	314.200.000,00	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis alat-alat yang diperlukan	12 bulan	10.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis alat-alat yang diperlukan	12 bulan	10.000.000,00	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah eksemplar koran	12 bulan	60.840.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah eksemplar koran	12 bulan	60.840.000,00	
8	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya makan minum	12 bulan	45.000.000,00	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya makan minum	12 bulan	45.000.000,00	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR PROVINSI	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat luar daerah	12 bulan	125.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR PROVINSI	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat luar daerah	12 bulan	125.000.000,00	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	175.000.000,00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	12 bulan	175.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk,baliho dan lain-lain	1 tahun	30.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk,baliho dan lain-lain	1 tahun	30.000.000,00	
<b>II.</b>	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>495.400.000,00</b>	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>495.400.000,00</b>	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya sejumlah perlengkapan gedung kantor	1 Paket	50.000.000,00	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya sejumlah perlengkapan gedung kantor	1 Paket	50.000.000,00	
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	1 Paket	83.400.000,00	Pengadaan peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	1 Paket	83.400.000,00	
3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	12 Bulan	12.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	12 Bulan	12.000.000,00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	50.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung	50.000.000,00	
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	200.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	200.000.000,00	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	12 Bulan	25.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	12 Bulan	25.000.000,00	
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	75.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 Paket	75.000.000,00	
<b>III.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>75.000.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>75.000.000,00</b>	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	1 Paket	75.000.000,00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	1 Paket	75.000.000,00	
<b>IV.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>25.000.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>25.000.000,00</b>	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	1 Tahun	25.000.000,00	Pendidikan dan pelatihan formal	LUAR PROVINSI	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	1 Tahun	25.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>156.850.000,00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>156.850.000,00</b>	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SOPD	7 Dokumen	136.850.000,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SOPD	7 Dokumen	136.850.000,00	
2	Pengembangan Reformasi Birokrasi	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi	1 Laporan	20.000.000,00	Pengembangan Reformasi Birokrasi	KOTA PALANGKA RAYA	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi	1 Laporan	20.000.000,00	
<b>VI.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>				<b>46.427.300,00</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>				<b>46.427.300,00</b>	
1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	1 Dokumen	46.427.300,00	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	1 Dokumen	46.427.300,00	
<b>VII.</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				<b>926.000.000,00</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				<b>926.000.000,00</b>	
1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	KOTA PALANGKA RAYA	Meningkatnya kinerja daerah yang mengelola sampah	1 Laporan	50.000.000,00	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	KOTA PALANGKA RAYA	Meningkatnya kinerja daerah yang mengelola sampah	1 Laporan	50.000.000,00	
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan Green City	14 Kab/Kota	526.000.000,00	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan Green City	14 Kab/Kota	526.000.000,00	
3	Bimbingan teknis persampahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	60 orang	40.000.000,00	Bimbingan teknis persampahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	60 orang	40.000.000,00	
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KOTA PALANGKA RAYA	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 kota	180.000.000,00	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KOTA PALANGKA RAYA	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 kota	180.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
5	Lomba-Lomba Kebersihan Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman	38 SOPD	130.000.000,00	Lomba-Lomba Kebersihan Kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman	38 SOPD	130.000.000,00	
<b>VIII.</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahan Lingkungan Hidup</b>				<b>1.196.750.000,00</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahan Lingkungan Hidup</b>				<b>1.196.750.000,00</b>	
1	Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terwujudnya kota yang berwawasan,bersih,teduh,dan peduli terhadap lingkungan	14 kab/kota	150.000.000,00	Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terwujudnya kota yang berwawasan,bersih,teduh,dan peduli terhadap lingkungan	14 kab/kota	150.000.000,00	
2	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya pemantauan pembinaan pengelolaan limbah B3 di Kalimantan Tengah	14 kab/kota	125.000.000,00	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya pemantauan pembinaan pengelolaan limbah B3 di Kalimantan Tengah	14 kab/kota	125.000.000,00	
3	Pengkajian dampak lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terselesaikannya pengkajian dokumen KLHS yang disusun oleh 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	150.000.000,00	Pengkajian dampak lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terselesaikannya pengkajian dokumen KLHS yang disusun oleh 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	14 kab/kota	150.000.000,00	
4	Pemantauan kualitas air	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya data pemantauan kualitas air	1 sungai	100.000.000,00	Pemantauan kualitas air	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya data pemantauan kualitas air	1 sungai	100.000.000,00	
5	Pemantauan kualitas udara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya data kualitas udara ambien	5 lokasi	100.000.000,00	Pemantauan kualitas udara	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya data kualitas udara ambien	5 lokasi	100.000.000,00	
6	pengawasan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah perusahaan yang taat terhadap izin lingkungan	25 Perusahaan	200.000.000,00	pengawasan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah perusahaan yang taat terhadap izin lingkungan	25 Perusahaan	200.000.000,00	
7	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersusunnya dokumen inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air	2 DAS	50.000.000,00	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersusunnya dokumen inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air	2 DAS	50.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
8	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilaian AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah KPA berlisensi yang meningkat pengetahuannya dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL	4 kab/kota	50.000.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilaian AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah KPA berlisensi yang meningkat pengetahuannya dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL	4 kab/kota	50.000.000,00	
9	Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	20 perusahaan / badan usaha	100.000.000,00	Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	20 perusahaan / badan usaha	100.000.000,00	
10	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Kalimantan Tengah	42 sekolah	171.750.000,00	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Kalimantan Tengah	42 sekolah	171.750.000,00	
<b>IX.</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			<b>200.000.000,00</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			<b>200.000.000,00</b>	
1	Pelaksanaan program HoB (Hearth of Borneo)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya konservasi daerah kawasan hutan adat	1 Dokumen	150.000.000,00	Pelaksanaan program HoB (Hearth of Borneo)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya konservasi daerah kawasan hutan adat	1 Dokumen	150.000.000,00	
2	Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Teridentifikasi dan terverifikasi wilayah adat masyarakat adat dan hukum adat yang perlu dikonservasi	1 Dokumen	50.000.000,00	Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Teridentifikasi dan terverifikasi wilayah adat masyarakat adat dan hukum adat yang perlu dikonservasi	1 Dokumen	50.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
X.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>				<b>25.000.000,00</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>				<b>25.000.000,00</b>	
1	Inventarisasi ekosistem mangrove	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya data ekosistem mangrove	1 Laporan	25.000.000,00	Inventarisasi ekosistem mangrove	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya data ekosistem mangrove	1 Laporan	25.000.000,00	
XI.	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>				<b>2.888.492.950,00</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>				<b>2.888.492.950,00</b>	
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya pemberitaan informasi pada media massa	1 Kota	129.921.950,00	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya pemberitaan informasi pada media massa	1 Kota	129.921.950,00	
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terdatanya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di kabupaten/kota	4 kab/kota	75.000.000,00	Pengembangan data dan informasi lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terdatanya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di kabupaten/kota	4 kab/kota	75.000.000,00	
3	Penyelenggaraan pameran LH di daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terselenggaranya pameran LH	1 Keg	150.000.000,00	Penyelenggaraan pameran LH di daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terselenggaranya pameran LH	1 Keg	150.000.000,00	
4	Penyelenggaraan hari-hari besar Lingkungan Hidup	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia	1 Keg	75.000.000,00	Penyelenggaraan hari-hari besar Lingkungan Hidup	KOTA PALANGKA RAYA	Terlaksananya peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia	1 Keg	75.000.000,00	
5	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	LUAR PROVINSI	Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Lingkungan Hidup dan Rapat Kerja Ekoregion Kalimantan Tahun 2019	2 Keg	153.500.000,00	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	LUAR PROVINSI	Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Lingkungan Hidup dan Rapat Kerja Ekoregion Kalimantan Tahun 2019	2 Keg	153.500.000,00	
6	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah alat pemantauan kualitas air di Kabupaten/Kota	1 Paket	555.071.000,00	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah alat pemantauan kualitas air di Kabupaten/Kota	1 Paket	555.071.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
7	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya status Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 berbasis Jasa Ekosistem dalam bentuk Atlas Peta Indikatif dan Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Provinsi	14 Kab/Kota	150.000.000,00	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersedianya status Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 berbasis Jasa Ekosistem dalam bentuk Atlas Peta Indikatif dan Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Provinsi	14 Kab/Kota	150.000.000,00	
8	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersusunnya dokumen SLHD Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersusunnya dokumen SLHD Provinsi	1 Dokumen	100.000.000,00	
9	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersusunnya dokumen RPPLH	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Tersusunnya dokumen RPPLH	1 Dokumen	1.500.000.000,00	
<b>XII.</b>	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>				<b>175.000.000,00</b>	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>				<b>175.000.000,00</b>	
1	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	2 kegiatan	100.000.000,00	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	2 kegiatan	100.000.000,00	
2	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terbitnya perda karhutla	14 Kab/Kota	75.000.000,00	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Terbitnya perda karhutla	14 Kab/Kota	75.000.000,00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Penting
XIII.	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>				<b>420.000.000,00</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>				<b>420.000.000,00</b>	
1	Penataan RTH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Ruang Terbuka Hijau yang tertata	14 Kab/Kota	370.000.000,00	Penataan RTH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Ruang Terbuka Hijau yang tertata	14 Kab/Kota	370.000.000,00	
XIV.	<b>Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan LH</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan LH</b>				<b>50.000.000,00</b>	
1	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN	Presentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	100%	50.000.000,00	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN	Presentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	100%	50.000.000,00	
XV.	<b>Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>				<b>70.000.000,00</b>	<b>Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</b>				<b>70.000.000,00</b>	
1	Pengendalian dampak perubahan iklim	PROVINSI KALIMANTAN	Tersedianya Dokumen Inventarisasi GRK	1 Dokumen	70.000.000,00	Pengendalian dampak perubahan iklim	PROVINSI KALIMANTAN	Tersedianya Dokumen Inventarisasi GRK	1 Dokumen	70.000.000,00	
	<b>JUMLAH</b>				<b>8.435.280.250,00</b>	<b>JUMLAH</b>				<b>8.435.280.250,00</b>	

# **LAMPIRAN 4**

## **TABEL 2.4**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah**

TABEL 2.4. USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 / KEGIATAN MUSREMBANG TAHUN 2018

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<b>A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>					
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jelai, Sukamara, Balai Riam, Pantai Lunci, Permata Kecubung, Kab. Sukamara	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan LH	1 Paket	
<b>B. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>					
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau	Pengadaan Tong Sampah	1 Paket	
2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau	Pengadaan Pengangkut sampah R3	10 Unit	
3	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau	Gerobak sampah	20 Unit	
4	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau	Pengadaan Ambrol dan mesin pengangkut	1 Paket	
5	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau	Pengadaan Truc Pengangkut sampah	2 Unit	
6	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat	Lanjutan Pembuatan Drainase Lingkungan TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang	1 Paket	
7	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat	Lanjutan Pembuatan Parit Pembatas TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang	1 Paket	
8	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat	Pemeliharaan Rutin Jalan TPA Baru Trans LIK Desa Pasir Panjang	1 Paket	
9	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat	Penutup Tanah Sanitary Landfill TPA Trans LIK Desa Pasir Panjang	1 Paket	
<b>C. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>					
1	Operasional Laboratorium Lingkungan	Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau	Pengadaan alat laboratorium lingkungan	1 Paket	
2	Operasional Laboratorium Lingkungan	Katingan Hilir, Kab. Katingan	Pengadaan Graphite Furnace untuk AAS	1 unit	
3	Operasional Laboratorium Lingkungan	Katingan Hilir, Kab. Katingan	Pengadaan Microwave Digester	1 unit	
4	Operasional Laboratorium Lingkungan	Katingan Hilir, Kab. Katingan	Pengadaan Rotary Evaporator	1 unit	
5	Pemantauan kualitas air	Jenamas, Karau Kuala, Dusun Hilir, Dusun Utara, Dusun Selatan, Gunggung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan	Pengujian Kualitas Air Sungai dan Danau serta Kualitas Udara di Kabupaten Barito Selatan	6 kecamatan	
6	Operasional Laboratorium Lingkungan	Jelai, Sukamara, Balai Riam, Pantai Lunci, Permata Kecubung, Kab. Sukamara	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang LH (Pengadaan Alat Sampling Udara dan Air)	2 Alat	
7	Operasional Laboratorium Lingkungan	Sukamara	Pemantauan Kualitas Air dan Udara (Pengadaan Alat Uji Lab Uji BOD)	1 Paket	
8	Pemantauan kualitas udara	Pahandut, Kota Palangka Raya	Pemantauan Kualitas Udara di Wilayah Kota Palangka Raya	12 Laporan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
<b>D.</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>				
1	Pengendalian dampak perubahan iklim	Sukamara	Mitigasi Proklam (Pengadaan Sarana Untuk Mendukung Program Kampung Iklim Berupa Sumur Bersih, Hidroponik Mesin Jahit Untuk Pengelolaan 3R Sampah, Timbangan Manual, Komposter dan Bibit Tabulapof)	1 Paket	
<b>E.</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>				
1	Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Jelai, Sukamara, Balai Riam, Pantai Lunci, Permata Kecubung, Kab. Sukamara	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	1 Dokumen	
<b>F.</b>	<b>Program Pengendalian kebakaran hutan</b>				
1	Pengawasan dan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan lahan dan pekarangan	Sukamara	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Honorarium TeaM Serbu Api untuk 5 Desa selama 4 Bulan)	1 Paket	
2	Pengadaan alat pemadam kebakaran hutan	Sukamara	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sarana Patroli Terpadu Untuk 5 Desa Berupa Sepeda Motor, Menara Pengawas dan Fasilitasi Pembentukan Regu TSA dan Pembelian SAPRAS)	1 Paket	
<b>G.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur</b>				
10	Pembangunan IPAL	Maliku, Pandih Batu, Jabiren Raya, Kahayan Hilir, Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau	Pengadaan IPAL Puskesmas Rawat Inap	5 Paket	

# **LAMPIRAN 5**

## **TABEL 4.1**

### **Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah**

**TABEL 4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
<b>2.05-2.5.0101-1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>1.685.360.000,00</b>				<b>1.863.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	KOTA PALANGKA RAYA	1.000 surat	10.000.000,00	APBD		1.500 surat	15.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening pembayaran tenaga air, listrik dan telekomunikasi	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	200.000.000,00	APBD		12 bulan	250.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan ijin operasional kendaraan dinas	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	25.000.000,00	APBD		12 bulan	27.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola keuangan dan jumlah pegawai kontrak yang menerima Honorarium	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	690.320.000,00	APBD		12 bulan	700.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	314.200.000,00	APBD		12 bulan	350.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat-alat yang diperlukan	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	10.000.000,00	APBD		12 bulan	15.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar koran	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	60.840.000,00	APBD		12 bulan	61.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum	KOTA PALANGKA RAYA	12 bulan	45.000.000,00	APBD		12 bulan	45.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat luar daerah	LUAR PROVINSI	12 bulan	125.000.000,00	APBD		12 bulan	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	terlaksananya kegiatan-kegiatan rapat koordinasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	12 bulan	175.000.000,00	APBD		12 bulan	200.000.000,00
2.05-2.5.0101-1.56	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Tersedianya barang cetakan berupa spanduk, baliho dan lain-lain	KOTA PALANGKA RAYA	1 tahun	30.000.000,00	APBD		1 tahun	50.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-2</b>	<b>Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>495.400.000,00</b>				<b>675.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-2.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sejumlah perlengkapan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket	50.000.000,00	APBD		1 Paket	75.000.000,00
2.05-2.5.0101-2.9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket	83.400.000,00	APBD		1 Paket	100.000.000,00
2.05-2.5.0101-2.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	KOTA PALANGKA RAYA	12 Bulan	12.000.000,00	APBD		12 Bulan	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.05-2.5.0101-2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	KOTA PALANGKA RAYA	1 Gedung	50.000.000,00	APBD		1 Gedung	80.000.000,00
2.05-2.5.0101-2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	KOTA PALANGKA RAYA	12 Bulan	200.000.000,00	APBD		12 Bulan	250.000.000,00
2.05-2.5.0101-2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	KOTA PALANGKA RAYA	12 Bulan	25.000.000,00	APBD		12 Bulan	50.000.000,00
2.05-2.5.0101-2.141	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket	75.000.000,00	APBD		1 Paket	100.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>				<b>75.000.000,00</b>				<b>100.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan seragam pakaian dinas	KOTA PALANGKA RAYA	1 Paket	75.000.000,00	APBD		1 Paket	100.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>25.000.000,00</b>				<b>100.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-5.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	LUAR PROVINSI	1 Tahun	25.000.000,00	APBD		1 Tahun	100.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-6</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>156.850.000,00</b>				<b>200.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SOPD	KOTA PALANGKA RAYA	7 Dokumen	136.850.000,00	APBD		7 Dokumen	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-6.87	Pengembangan Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	20.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-8</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Aset/Barang Daerah</b>				<b>46.427.300,00</b>				<b>50.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-8.1	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah dokumen penataan aset/barang milik daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	46.427.300,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-15</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>				<b>926.000.000,00</b>				<b>1.050.000.000</b>
2.05-2.5.0101-15.1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Meningkatnya kinerja daerah yang mengelola sampah	KOTA PALANGKA RAYA	1 Laporan	50.000.000,00	APBD		1 Laporan	75.000.000,00
2.05-2.5.0101-15.2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan pada Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman dan Green City	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Kab/Kota	526.000.000,00	APBD		14 Kab/Kota	550.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.05-2.5.0101-15.6	Bimbingan teknis persampahan	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	60 orang	40.000.000,00	APBD		60 orang	75.000.000,00
2.05-2.5.0101-15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terbentuknya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	KOTA PALANGKA RAYA	1 kota	180.000.000,00	APBD		1 kota	200.000.000,00
2.05-2.5.0101-15.26	Lomba-Lomba Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan bersih dan nyaman	KOTA PALANGKA RAYA	38 SOPD	130.000.000,00	APBD		38 SOPD	150.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-16</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusahaan Lingkungan Hidup</b>				<b>1.196.750.000,00</b>				<b>2.300.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-16.1	Koordinasi Penilaian kota sehat/adipura	Terwujudnya kota yang berwawasan,bersih,teduh,dan peduli terhadap lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 kab/kota	150.000.000,00	APBD		14 kab/kota	200.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.6	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Terlaksananya pemantauan pembinaan pengelolaan limbah B3 di Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 kab/kota	125.000.000,00	APBD		14 kab/kota	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.7	Pengkajian dampak lingkungan	Terselesaikannya pengkajian dokumen KLHS yang disusun oleh 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 kab/kota	150.000.000,00	APBD		14 kab/kota	200.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.17	Pemantauan kualitas air	Tersedianya data pemantauan kualitas air	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 sungai	100.000.000,00	APBD		1 sungai	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.18	Pemantauan kualitas udara	Tersedianya data kualitas udara ambien	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5 lokasi	100.000.000,00	APBD		5 lokasi	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.30	Pengawasan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	Jumlah perusahaan yang taat terhadap izin lingkungan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	25 Perusahaan	200.000.000,00	APBD		25 Perusahaan	250.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.39	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	Tersusunnya dokumen inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 DAS	50.000.000,00	APBD		2 DAS	100.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.41	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilaian AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	Jumlah KPA berlisensi yang meningkat pengetahuannya dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 kab/kota	50.000.000,00	APBD		4 kab/kota	750.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.05-2.5.0101-16.42	Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan	Jumlah perusahaan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	20 perusahaan / badan usaha	100.000.000,00	APBD		20 perusahaan / badan usaha	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-16.43	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	Terlaksananya pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang terdapat di Kalimantan Tengah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	42 sekolah	171.750.000,00	APBD		42 sekolah	200.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-17</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>200.000.000,00</b>				<b>275.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-17.17	Pelaksanaan program HoB (Hearth of Borneo)	Terlaksananya konservasi daerah kawasan hutan adat	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	150.000.000,00	APBD		1 Dokumen	175.000.000,00
2.05-2.5.0101-17.22	Pemetaan Wilayah Adat yang Perlu di Konservasi	Teridentifikasi dan terverifikasi wilayah adat masyarakat adat dan hukum adat yang perlu dikonservasi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-18</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>				<b>25.000.000,00</b>				<b>50.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-18.13	Inventarisasi ekosistem mangrove	Tersedianya data ekosistem mangrove	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Laporan	25.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-19</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup</b>				<b>2.888.492.950,00</b>				<b>3.775.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-19.1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Terlaksananya pemberitaan informasi pada media massa	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Kota	129.921.950,00	APBD		1 Kota	150.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.05-2.5.0101-19.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Terdapatnya/terinventarisasinya jumlah pengembangan data dan informasi bidang lingkungan di provinsi maupun di kabupaten/kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4 kab/kota	75.000.000,00	APBD		4 kab/kota	100.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.10	Penyelenggaraan pameran LH di daerah	Terseenggaranya pameran LH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Keg	150.000.000,00	APBD		1 Keg	200.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.17	Penyelenggaraan hari-hari besar Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia	KOTA PALANGKA RAYA	1 Keg	75.000.000,00	APBD		1 Keg	100.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.19	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	Terlaksananya Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Lingkungan Hidup dan Rapat Kerja Ekoregion Kalimantan Tahun 2019	LUAR PROVINSI	2 Keg	153.500.000,00	APBD		2 Keg	175.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.22	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	Jumlah alat pemantauan kualitas air di Kabupaten/Kota	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Paket	555.071.000,00	DAK		14 Kab/Kota	700.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.27	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	Tersedianya status Daya Dukung dan Daya Tampung Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 berbasis Jasa Ekosistem dalam bentuk Atlas Peta Indikatif dan Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Provinsi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Kab/Kota	150.000.000,00	APBD		14 Kab/Kota	200.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.28	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya dokumen SLHD Provinsi	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1 Dokumen	150.000.000,00
2.05-2.5.0101-19.30	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Tersusunnya dokumen RPPLH	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1 Dokumen	1.500.000.000,00	APBD		1 Dokumen	2.000.000.000,00
<b>2.05-2.5.0101-22</b>	<b>Program Pengendalian Kebakaran Hutan</b>				<b>175.000.000,00</b>				<b>225.000.000,00</b>
2.05-2.5.0101-22.5	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2 kegiatan	100.000.000,00	APBD		2 kegiatan	125.000.000,00
2.05-2.5.0101-22.9	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terbitnya perda karhutla	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Kab/Kota	75.000.000,00	APBD		14 Kab/Kota	100.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.05-2.5.0101-24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				370.000.000,00				400.000.000
2.05-2.5.0101-24.5	Penataan RTH	Ruang Terbuka Hijau yang tertata	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14 Kab/Kota	370.000.000,00	APBD		14 Kab/Kota	400.000.000
2.05-2.5.0101-25	Program Penataan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan LH				50.000.000,00				75.000.000,00
2.05-2.5.0101-25.6	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	Presentase penyelesaian sejumlah kasus dari pengaduan yang diterima	PROVINSI KALIMANTAN	100%	50.000.000,00	APBD		100%	75.000.000,00
2.05-2.5.0101-29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				70.000.000,00				100.000.000,00
2.05-2.5.0101-29.9	Pengendalian dampak perubahan iklim	Tersedianya Dokumen Inventarisasi GRK	PROVINSI KALIMANTAN	1 Dokumen	70.000.000,00	APBD		14 Kab/Kota	100.000.000,00
					8.385.280.250,00				11.238.000.000